

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang dianggarkan dalam APBD yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang sifatnya menambah ekuitas dana. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan keuangan daerah yang dapat diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerah yang dapat dipergunakan dalam pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk mendapatkan tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. (Mamese, 1995)

Sumber-sumber PAD meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD harus dikelola daerah agar sesuai

dengan kebutuhan prioritas daerah sehingga dalam upaya penggalian sumber pendapatannya, pemerintah tidak mendistorsi perekonomian. Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih baik, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

2.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan disebut juga transfer atau gratis. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya

keuangan dan ekonomi daerah selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan public antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim, 2003)

Perincian pendapatan yang termasuk ke dalam dana perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni dana Perimbangan yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) itu yakni : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak, pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, gas bumi dan pertambangan panas bumi.

2.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Ada juga pengertian lain tentang pertumbuhan ekonomi yaitu merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ketahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006: 9)

Sadono Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertumbuhan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2011: 423).

M. P Todaro mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat

sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional semakin besar.(Todaro, 2000).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional riil atau Produk Domestik Regional Bruto dalam jangka panjang yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

2.3 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah daerah diberi mandat (steward) dalam mengelolah sumber daya daerah yang bertujuan untuk membiayai segala kebutuhan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang prima serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup penting dalam membiayai belanja pemerintah daerah guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Mardiasmo (2002) dalam Prakarsa (2014) menyebutkan bahwa upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah daerah yang merupakan tujuan pelaksanaan Otonomi Daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan sumber Pendapatan Asli Darerah (PAD) yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegritas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dengan meningkatkan kemandirian suatu daerah melalui peningkatan PAD dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, sebaliknya jika PAD rendah maka pertumbuhan ekonomi juga rendah.

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Prespektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi.

Menurut Harianto (2007) dimana PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri (Tambunan, 2006).

2.4 Hubungan Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi

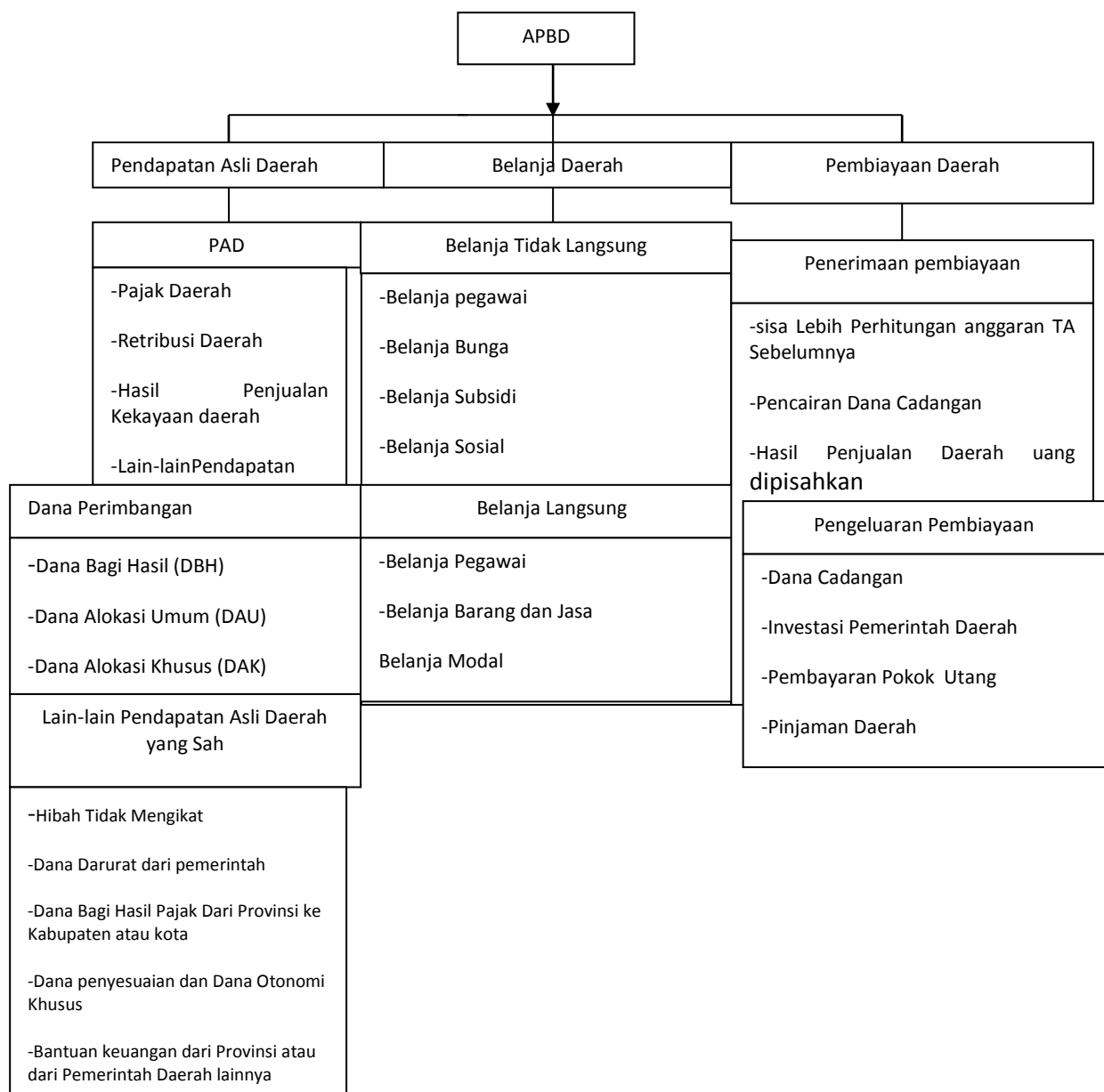
Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan (melalui bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan bagi hasil pajak provinsi) sebagian besar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan implikasi bahwa dana perimbangan

yang berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil pajak provinsi telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.5 Struktur APBD

Gambar 2.1
Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah



Sumber Muslimpoliticians.blogspot.com

2.6 Penelitian Terdahulu

Table 2.1
PenelitianTerdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Chindy Febry Rori, Antonius Y Luntungan, Audie O Niode (2016)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013	Analisis Regresi sederhana	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) dapat diambil simpulan sebagai berikut : (PAD) berpengaruh positif atau signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2001-2013. Secara teori apabila PAD naik, maka Pertumbuhan Ekonomi akan naik.
2	Misbahul Munir, Nera Marinda Mahdar (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam mendukung pelaksanaan	Analisis Regresi	Yang pertama secara parsial variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal ini

		Otonomi Daerah		ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,139 yang lebih besar dari probabilitas penelitian ini sebesar 0,005, yang kedua, secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal dalam mendukung pelaksanaan Otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0.063 yang lebih besar dari probabilitas penelitian ini sebesar 0.05, yang ketiga, secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari probabilitas penelitian ini sebesar 0,005, yang empat, secara simultan variabel
--	--	----------------	--	--

				Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari probabilitas penelitian ini sebesar 0,05
3	Lingga Swastika (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten Boyolali periode tahun 2005-2012	Regresi Berganda	Berdasarkan hasil data diketahui bahwa nilai $t_{hitung} (-3.399) > t_{tabel}(2.776)$ dan $(p=0.027)$ pada taraf signifikansi maka H_1 Gagal ditolak. Artinya Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hal ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka Pengalokasian Anggaran Belanja Modal akan menurun dan sebaliknya, yang

				kedua, berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa $t_{hitung} (-2.260) < t_{tabel} (2.776)$ dan $(p=0.087)$ pada taraf signifikansi 5% maka H₂ Gagal diterima. Artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hal ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Pengalokasian Anggaran Belanja Modal akan naik, dan sebaliknya. yang ketiga, berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa nilai $t_{hitung} (4.976) > t_{tabel} (2.776)$ dan $(p=0.008)$ pada taraf signifikansi 5% maka H₃ Gagal ditolak, artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hal ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi Dana
--	--	--	--	--

				Alokasi Umum maka Pengalokasian Anggaran Belanja Modal akan naik, dan sebaliknya.
4	Masayu Rahma wati, Catur Martian Fajar (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Daerah Kota Bandung	Analisis Korelasi dan Analisis Regresi Berganda	Pendapatan Asli Daerah memiliki Pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat diukur pada hasil pengujian koefisien korelasi yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan dengan arah positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan hasil koefisien korelasi Dana Perimbangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki

				pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Daerah yang diperoleh baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan ditujukan untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah khususnya kebutuhan dalam meningkatkan pembangunan daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat daerah.
5	Abdul Mafahir, Aris Soelistiyo (2017)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat	Model Regresi Data Panel	Hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat diambil kesimpulan yaitu : perkembangan PDRB,PAD, DAU dan DAK mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2016. Pendapatan Asli

				Daerah berpengaruh tidak signifikan dan bersifat negatif terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
--	--	--	--	--

Di olah penulis

2.7 Karangka Pemikiran Teoritis

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama Pendapatan Daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana. Dengan demikian usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah seharusnya dilihat dari prespektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian indonesia.

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri

Pendapatan daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah

Pendapatan daerah juga sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, secara umum pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur utama berhasil atau tidaknya perekonomian suatu daerah karena berhasil atau tidaknya program-program pembangunan baik di daerah maupun nasional sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional, jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan sama dan saling berkaitan.

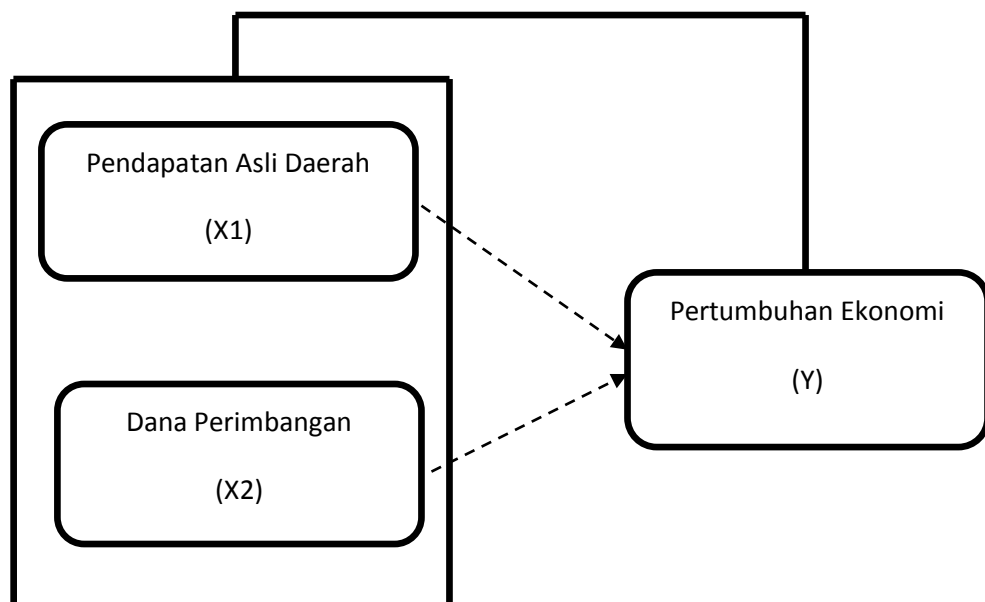
Adapun juga Dana Perimbangan, yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana perimbangan juga terdiri atas Dana Bagi Hasil yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan

keadilan antar daerah, dan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dapat disimpulkan bahwa ketiganya sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dikarenakan mempunyai tujuan yang sama untuk mensejahterakan masyarakat.

Dengan demikian Pemerintah Kota Kupang harus dapat menggali potensi daerah secara optimal, sehingga Pendapatan Asli Daerah bukan saja dapat mensejahterakan masyarakat tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota kupang

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran



Parsial: $\longrightarrow$

Simultan : $\dashrightarrow$

2.8 Hipotesis Skripsi

1. Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Didugabahwa Dana Perimbangan berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.